

SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBLOKIRAN KONTEN
DAN AKSES MEDIA SOSIAL BAGI ANAK**



Disusun Oleh:

SYAFRINA ALIYAH RACHMAN

NIM : 02123072

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2026**

SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBLOKIRAN KONTEN
DAN AKSES MEDIA SOSIAL BAGI ANAK**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**

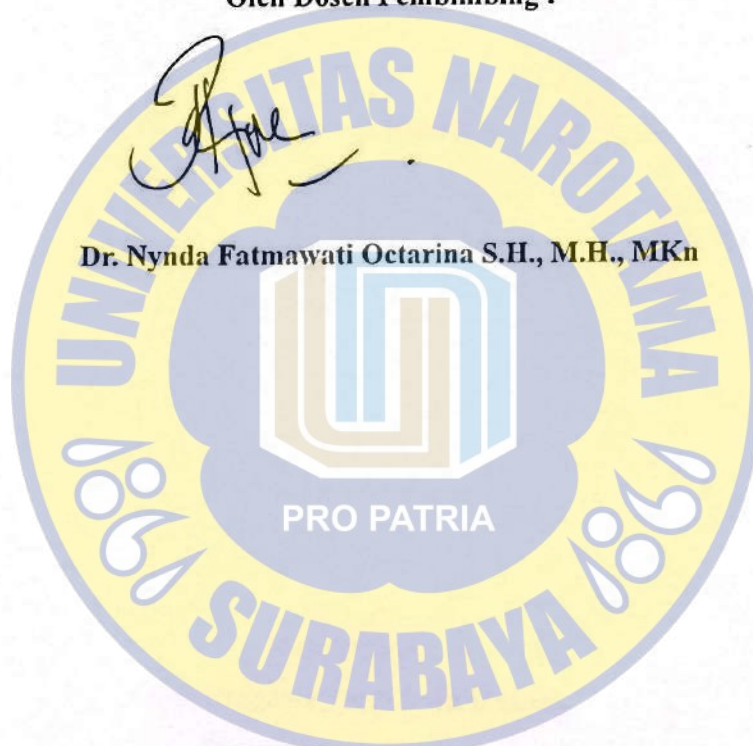


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 2 FEBRUARI 2026
UNTUK DISIDANGKAN
PADA TANGGAL 4 FEBRUARI 2026**

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Nynda Fatmawati Octarina S.H., M.H., MKn

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama



Arwanto, S.H., M.H.

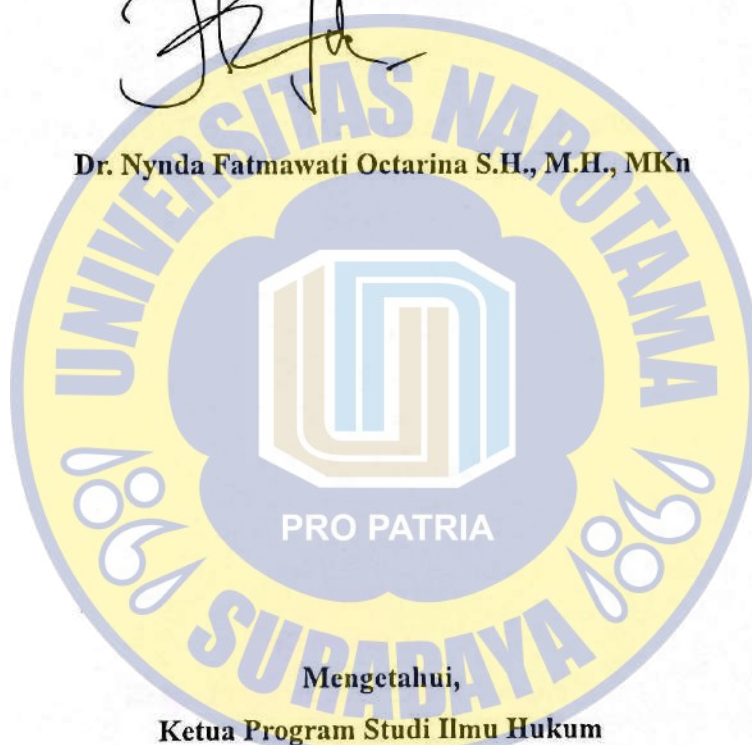
LEMBAR PERSETUJUAN

SURABAYA, 2 FEBRUARI 2026
DISETUJUI DAN DITERIMA BAIK

Oleh Dosen Pembimbing :

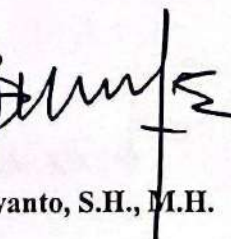


Dr. Nynda Fatmawati Octarina S.H., M.H., MKn



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

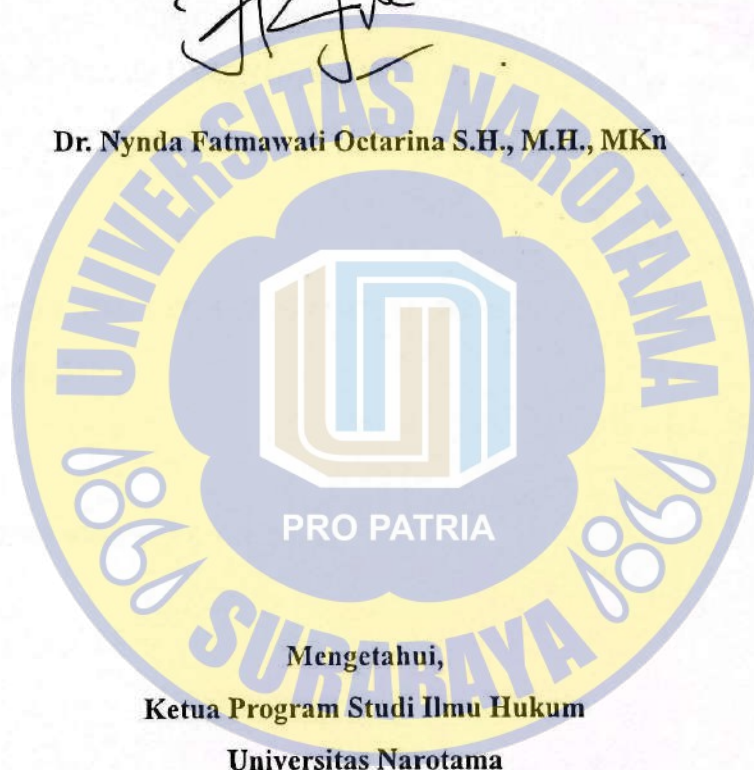
Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 10 Maret 2026

Oleh Dosen Pembimbing :



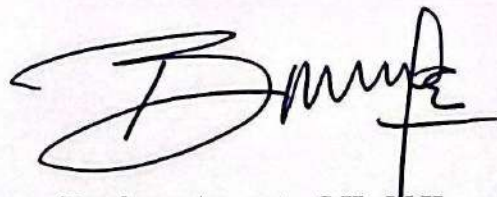
Dr. Nynda Fatmawati Octarina S.H., M.H., MKn



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama




Bambang Arwanto, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untul memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada tanggal 4 Februari 2026

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. ERMA ZAHRO NOOR S.H., M.H.



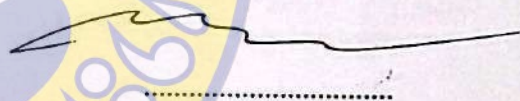
.....

Sekretaris : Dr. NYNDA FATMAWATI OCTARINA S.H.,
M.H., MKn

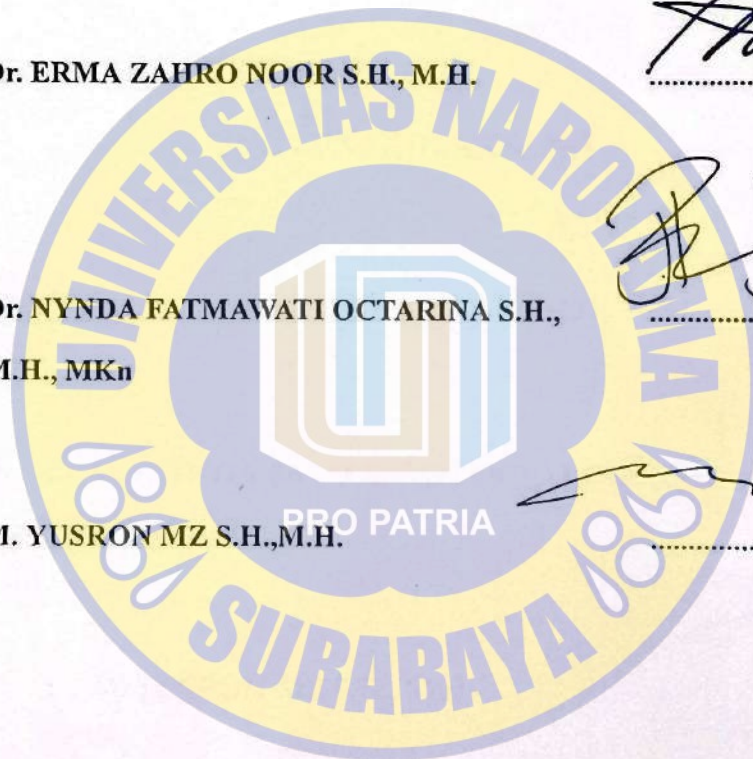


.....

Anggota : M. YUSRON MZ S.H., M.H.

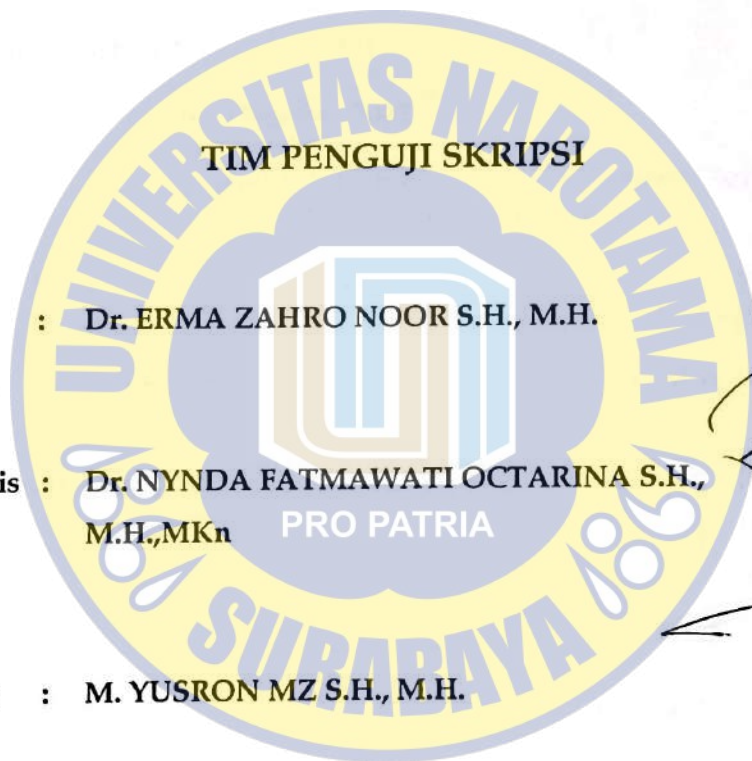


.....



SKRIPSI

PADA TANGGAL : 4 Februari 2026



TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. ERMA ZAHRO NOOR S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. NYNDA FATMAWATI OCTARINA S.H.,
M.H.,MKn

Anggota : M. YUSRON MZ S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI^{1*}

Nama Mahasiswa : Syafrina Aliyah Rachman

No. Induk Mahasiswa : 02123073

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2023

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. Kerangka Hukum Tata Negara dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) terhadap Infrastruktur Vital: Studi Perbandingan Indonesia dan Australia.
2. Kewenangan Pemerintah dalam Pemblokiran Konten dan Akses Media Sosial bagi Anak

Untuk disetujui sebagai Judul Skripsi dengan Usulan Dosen Pembimbing: Dr. Nynda Fatmawati, S.H., M.H.

Mengetahui,

Surabaya, 22 September 2025

Calon Dosen Pembimbing

(Dr. Nynda Fatmawati, S.H., M.H.)

Mahasiswa

(Syafrina Aliyah Rachman)

Kepala Departemen

UNIVERSITAS *Narotama*Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.idFAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

(Evi Retnowulan, S.H., M.Hum.)

Menyetujui,
Ketua Program StudiBambang Arwanto, S.H., M.H.

Adapun persyaratan pendaftaran Judul Skripsi, antara lain:

1. mengisi Form Pendaftaran Judul Skripsi;
2. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
3. telah KRS "Penelitian Hukum" pada semester berkenaan;
4. telah memperoleh minimal 124 (seratus dua puluh empat) SKS;
5. tidak memiliki Nilai D;
6. telah lulus MKDU, Metode Penelitian Hukum, Magang dan KKN Tematik Desa, Praktik Pradilan Semu dengan nilai minimal B;
7. fotokopi transkrip nilai sementara;
8. fotokopi kuitansi pembayaran SPP sampai bulan berkenaan dan uang Skripsi;
9. fotokopi 1 (satu) Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan BNSP dan telah dilegalisir LSP Narotama;
10. fotokopi sertifikat TOEFL;
11. fotokopi telah mengunggah 2 (dua) Proposal PKM atau telah publikasi 1 (satu) jurnal hukum; dan
12. fotokopi sertifikat seminar hukum minimal 5 (lima) buah.



UNIVERSITAS *Narotama*



FAKULTAS HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
 Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
 Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
 Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
 Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT TUGAS No.766/NR.FH/03/X/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM/Prodi	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi
Dr. NYNDA FATMAWATI OCTARINA S.H., M.H	02123073/ Ilmu Hukum	SYAFRINA ALIYAH RACHMAN	KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBLOKIRAN KONTEN DAN AKSES MEDIA SOSIAL BAGI ANAK

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Oktober 2025

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Syafina Aliyah Rachman

No. Induk : 02123073

Alamat : Jl. Gayungsari Barat No. 79, Surabaya.

Telp/HP : 0877 69 599 293

Pembimbing : Dr. Nynda Fatmawati Octarina S.H., M.H., M.Kn.

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah dalam Pemblokiran
Konten dan Akses Media Sosial Bagi Anak.

Tgl Dimulai : 20 November 2025

Surabaya, 20, November, 2025
Mahasiswa

Pembimbing

Dr. Nynda Fatmawati Octarina,
S.H., M.H., M.Kn.

Syafina Aliyah Rachman

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
 Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
 Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FH.08.02
 Tgl Berlaku : 1 Oktober 2018
 Revisi : 00

FAKULTAS HUKUM
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	Latar belakang	03/11/25	fr
2	Latar belakang	04/11/25	fr
3	rumusan masalah	06/11/25	fr
4	rumusan masalah & tujuan penelitian	10/11/25	fr
5	manfaat, orisinalitas, ringkasan	11/11/25	fr
6	metode penelitian, footnote.	12/11/25	fr
7	Pendekatan masalah, sistematika	13/11/25	fr
8	Perbaikan Bab I & II	24/11/25	fr
9	Penguatan landasan teori & kerangka	10/12/25	fr
10	Bab III	8/1/26	fr
11	Hasil Penelitian & Pembahasan	20/1/26	fr
12	kesimpulan & saran	29/1/26	fr
13	revisi keseluruhan	30/1/26	fr
14	revisi keseluruhan	3/2/26	fr

Syarat :

1. Pengajuan ujian Skripsi setelah bimbingan minimal 14 kali
2. Diperbolehkan ujian skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah ujian proposal skripsi



UNIVERSITAS *Narotama*
 Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
 Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI^{1*}

Nama Mahasiswa : SYAFRINA ALYAH RACHMAN

No. Induk Mahasiswa : 02123073

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2023

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Kewenangan Pemerintah dalam Pemblokiran Konten dan Akses Media

Sosial bagi Anak

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing

Surabaya, 20....
 Mahasiswa

(Dr. Nynda Fatmawati, S.H., M.H.)

(SYAFRINA ALYAH.)

Menyetujui,
 Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

^{1*} Pengajuan Ujian Proposal Skripsi harus menyertakan:

1. Proposal Skripsi 3 rangkap
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
4. Fotokopi kwitansi pembayaran Skripsi
5. Membawa Kartu Kehadiran Proposal Skripsi pada saat Ujian Proposal Skripsi



UNIVERSITAS *Narotama*
 Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
 Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama Mahasiswa : SYAFRINA ALIYAH R

No. Induk : 02123073

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1	SYAFRINA ALIYAH	Kewenangan Pemerintah dalam pemblokiran konten dan Akses Media Sosial lg Anak	20 / 11 / 2025	A R L
2	MURDIN	Kepastian Hukum Tata Usaha Negara	20 / 11 / 2025	A R L
3	A. Riza Mubarak	Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Kompetensi warga Terdampak ruang terbuka hijau	20 / 11 / 2025	A R L
4	Modesta Virginia Putri Calpitta P.	Kepastian hukum Penanganan Pelanggaran Anggota Dewan Perwakilan rakyat yang ditarik...	20 / 11 / 2025	A R L
5	Robby Tjoa	Penerapan Prinsip Keadilan Pajak dalam putusan hakim Pengadilan Pajak...	20 / 11 / 2025	A R L
6	Eddy Tajib	Kepastian Hukum penerbitan Surat keterangan bebas pajak penghasilan	20 / 11 / 2025	A R L
7	Zahrah Agus Mardiana	kepastian Hukum penyelenggaraan kawasan tanpa rokok di kabupaten sidogarjo.	20 / 11 / 2025	A R L

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Surabaya, 20, Nov, 2025
 Mahasiswa


 Bambang Arwanto, S.H., M.H.


 SYAFRINA ALIYAH RACHMAN


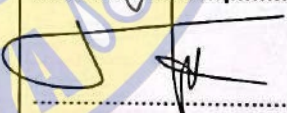
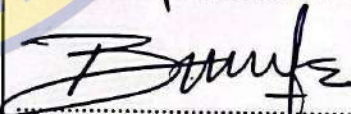


FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578


PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN
NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : SYAPRINA ALIYAH RACHMAN
 NIM : 02123073
 Tanggal Penilaian : 20 November 2025
 Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah dalam Pemblokiran konten dan Akses Media Sosial bagi Anak
 Pembimbing : Dr. Mynda Fatmawati Octarina S.H., M.H., M.Kn.

PANITIA PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Mynda Fatmawati Octarina S.H., M.H., M.Kn	
SEKRETARIS	Dr. Suwardi S.H., M.Hum	
ANGGOTA	Bambang Arwanto S.H., M.H.	

Surabaya,
 Pembimbing,



Dr. Mynda Fatmawati Octarina S.H., M.H., M.Kn



UNIVERSITAS *Narotama*
 Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
 Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FH.08.02
 Tgl Berlaku : 1 Oktober 2018
 Revisi : 00

FAKULTAS HUKUM
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SYAFFINA ALIYAH RACHMAN
 No. Induk : 02123 073
 Alamat : Jl. Gayung Sari Barat No. 79,
Surabaya.
 Telp/HP : 087769599293
 Pembimbing : Dr. Nynda Fatmawati, S.H., M.H.
 Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah dalam Pemblokiran
Konten dan Akses Media Sosial Bagi Anak.
 Tgl Dimulai : 11 November 2025

Surabaya, 03, Nov, 2025
 Mahasiswa

Pembimbing

Dr. Nynda Fatmawati, S.H., M.H.

SYAFFINA ALIYAH

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	Perbaikan Bab II & III	24/11/2015	<i>[Signature]</i>
2	Penguatan landasan Teori & kerangka	10/12/2015	<i>[Signature]</i>
3	Bab III	8/1/2016	<i>[Signature]</i>
4	Hasil Penelitian & Pembahasan	20/1/2016	<i>[Signature]</i>
5	kesimpulan & saran	29/1/2016	<i>[Signature]</i>
6	revisi keseluruhan	30/1/2016	<i>[Signature]</i>
7	revisi keseluruhan.	3/2/2016	<i>[Signature]</i>

Syarat :

1. Pengajuan ujian proposal Skripsi setelah bimbingan minimal 6 kali
2. Diperbolehkan ujian proposal skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS *Narotama*



FAKULTAS HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
 Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
 Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
 Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
 Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

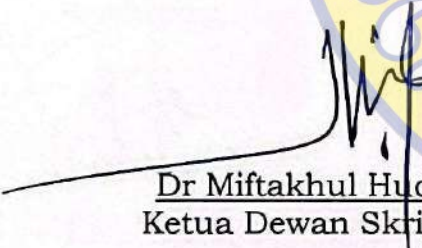
Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa:


1. Nama Mahasiswa SYAFRINA ALIYAH RACHMAN
2. NIM 02123073
3. Judul Skripsi /Tesis KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBLOKIRAN KONTEN DAN AKSES MEDIA SOSIAL BAGI ANAK

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 4 FEBRUARI 2026

Mengetahui,

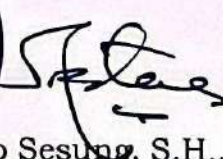
PRO PATRIA


Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H
 Ketua Dewan Skripsi dan Tesis


Dr. Tahegga Primananda A, S.H., M.H
 Sekretaris Dewan Skripsi dan Tesis

Dekan,




 Sianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
 Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
 Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI¹*

Nama Mahasiswa : SYAFRINA ALIYAH RACHMAN

No. Induk Mahasiswa : 02123073

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 23

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Kewenangan Pemerintah Dalam Pemblokiran Konten dan Akses Media Sosial Bagi Anak.

Mengetahui
 Pembimbing,

Surabaya, 02, Februari, 2024
 Mahasiswa

Dr. Nunda fatmawati, S.H.,

SYAFRINA ALIYAH R.

¹Pengajuan Ujian Skripsi diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal Ujian Proposal Skripsi, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotokopi Pengajuan Judul
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi (minimal 6 kali pembimbingan)
4. Fotokopi Pengajuan Ujian Proposal Skripsi
5. Fotokopi Kartu Kehadiran Ujian Proposal Skripsi
6. Fotokopi Kartu Bimbingan Skripsi (minimal 14 kali pembimbingan)
7. Sertifikat TOEFL NLC dengan skor minimal 450
8. Fotokopi Sertifikat
9. Skripsi 3 rangkap cover warna merah



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi





UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Syafrina Alyah R.

No. Induk : 02123073

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1	Marie Margam	Keabsahan Peralihan Aset lelang wajib pajak...	04/02/2026	
2	Yovita widyadinata	Tanggung gugat Apilicator marketplace...	04/2/2026	
3	Syafina Alyah	Keewenangan pemerintah dalam pemblokiran...	04/2/26	
4	Purwo Adi Nugroho	Analisa tindaan pidana korupsi ditinjau dari...	04/2/26	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Surabaya, 04, Februari, 2026.
Mahasiswa

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

SYAFRINA ALIYAH RACHMAN



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : SYAFRINA ALIYAH RACHMAN
 N I M : 02123 073
 Tanggal Penilaian : 4 februari 2026
 Judul Skripsi : KEWEMANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBLOKIRAN
 KONTEN DAN AKSES MEDIA SOSIAL BAGI ANAK
 Pembimbing : Dr. Nynda Fatmawati Octarina S.H., M.H., M.Kn

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Erma Zahro Moor, S.H., M.H.	
SEKRETARIS	Dr. Nynda Fatmawati Octarina S.H., M.H., M.Kn	
ANGGOTA	M. Yusron MZ S.H., M.H.	

Surabaya,
Pembimbing,

Dr. Nynda Fatmawati Octarina S.H., M.H., M.Kn.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 Maret 2026

Yang membuat pernyataan



SYAFRINA ALIYAH RACHMAN
NIM : 02123073

ABSTRAK

Transformasi digital telah menjadikan media sosial sebagai bagian integral dari kehidupan anak, sekaligus membuka risiko berupa eksploitasi, paparan konten berbahaya, dan kekerasan daring. Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai subjek hukum yang rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi yang mengatur pemblokiran dan pembatasan akses media sosial bagi anak serta menganalisis sejauh mana kewenangan pemerintah dalam melakukan pemblokiran konten dapat dijalankan tanpa melanggar hak konstitusional atas informasi dan kebebasan berekspresi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan pelaksanaannya, yang didukung oleh bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah dalam melakukan pemblokiran konten merupakan mandat hukum yang sah berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan ketegangan norma akibat ketidakjelasan batasan konten berbahaya, risiko pembatasan berlebihan (*overblocking*), serta kemungkinan pelanggaran hak konstitusional. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan tersebut harus

berlandaskan prinsip legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas guna menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan penghormatan hak asasi manusia.

Kata Kunci: kewenangan pemerintah, pemblokiran konten, media sosial, perlindungan anak, hak konstitusional.



ABSTRACT

Digital transformation has positioned social media as an integral part of children's lives while simultaneously exposing them to risks such as exploitation, harmful content, and online violence. In this context, the State bears a constitutional obligation to provide special protection to children as vulnerable legal subjects. This study aims to examine the regulations governing the blocking and restriction of social media access for children and to analyze the extent of governmental authority in implementing such measures in relation to the constitutional rights to information and freedom of expression.

This research employs a normative juridical method using statute and conceptual approaches. The analysis is based on primary legal materials, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Electronic Information and Transactions Law, the Child Protection Law, the Public Information Disclosure Law, and related implementing regulations, supported by relevant secondary sources.

The findings indicate that governmental authority to block online content constitutes a legitimate mandate grounded in the principle of the best interest of the child. However, its implementation may generate legal tension due to unclear standards in defining harmful content, risks of excessive restriction (overblocking), and potential infringement of constitutional rights. Therefore, the exercise of such authority must comply with the principles of legality, proportionality, transparency, and accountability to ensure a balanced protection of children without undermining fundamental rights.

Keywords: governmental authority, content blocking, social media, child protection, constitutional rights.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini dengan baik. Tanpa pertolongan dan dukungan dari berbagai pihak, karya ini tidak akan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Dalam proses penyusunan karya ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Nynda Fatmawati, selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan, masukan, dan arahan yang sangat berharga selama proses penyusunan karya ini.
2. Para dosen di lingkungan Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu, motivasi, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
3. Mama tercinta, Indriani Yasmin, atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti. Segala pengorbanan dan cinta beliau menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini.
4. Sahabat-sahabat tersayang, Detria Azka Shabirina, yang selalu hadir di setiap suka dan duka, memberikan semangat, tawa, dan ketenangan di saat penulis merasa lelah.
5. Teman-teman terbaik: Nana, Barru, Yusuf, Regina, Brili, dan Dinda, atas kebersamaan, canda tawa, dan dukungan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan karya ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat serta menjadi tambahan wawasan bagi pembaca.

Surabaya, 13 November 2025



Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Secara Teoritis	7
1.4.2 Secara Praktis	7
1.5 Orisinalitas Penelitian	8
1.6 Tinjauan Pustaka	11
1.6.1 Teori Kewenangan	11
1.6.2 Konsep Hak Anak	11
1.6.3 Konsep Perlindungan Anak	12
1.6.4 Konsep Media Sosial	12
1.7 Metode Penelitian	13
1.7.1 Tipe Penelitian	13
1.7.2 Pendekatan Masalah	14
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II BATASAN AKSES MEDIA SOSIAL BAGI ANAK	17

2.1 Anak sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Perlindungan Anak	17
2.2 Konsep Media Sosial dan Ruang Digital bagi Anak	29
2.3 Konsep Pemblokiran dan Pembatasan Akses dalam Hukum	33
2.4 Regulasi Nasional terkait Pemblokiran dan Pembatasan Akses Media Sosial bagi	35
2.5 Instrumen Hukum Internasional terkait Pembatasan Akses Digital bagi Anak	37
BAB III KEWENANGAN PEMBLOKIRAN KONTEN MEDIA SOSIAL BAGI ANAK DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK VERSUS HAK KONSTITUSIONAL ATAS INFORMASI DAN BEREKSPRESI	40
3.1 Kewenangan Pemblokiran Konten Media Sosial dalam Perspektif Perlindungan Anak	40
3.2 Hak Konstitusional atas Informasi dan Kebebasan Berekspresi	44
3.3 Konflik Norma dan Ketegangan Antara Perlindungan Anak dan Hak Konstitusional	49
3.4 Penyeimbangan antara Perlindungan Anak dan Hak Konstitusional	52
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Rekomendasi	59